
PENANAMAN BUDAYA DAMAI VIA PENDIDIKAN

Oleh : Yan Vita*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan proyek penanaman budaya damai lewat pendidikan. Pentingnya diskusi ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan merupakan pilar utama bagi transformasi nilai-nilai dan pembentukan karakter. Demikian juga nilai-nilai dan kebudayaan damai serta pribadi yang berkarakter mencintai dan berperilaku damai semestinya bisa dibentuk lewat pendidikan. Namun demikian pada kenyataannya pendidikan seringkali memiliki hubungan tarik menarik dengan lingkungan sosial, politik, ekonomi dan keagamaan. Kekerasan yang ada dalam lingkungan \-lingkungan tersebut juga akan sangat berpengaruh dengan proses pendidikan. Dalam konteks semacam itu maka tidak menutup kemungkinan pendidikan juga menjadi salah satu penyangga budaya kekerasan. Proses pendidikan yang seharusnya menjadi pilar bagi syi'ar perdamaianpun bisa sebaliknya menjadi pilar syi'ar kebencian. Dari sinilah urgensi penanaman budaya damai via pendidikan.

Kata Kunci: budaya damai, pendidikan, karakter

A. Pendahuluan

Dalam pergaulan antara manusia, semestinya budaya damai harus dilihat sebagai essensi baru kemanusiaan. Peradaban global baru mesti didasarkan kepada kesatuan internal dan keanakeragaman eksternal. Dalam konteks ini maka penyebaran budaya damai akan mempengaruhi kerangka pikir (*mind set*) kita yang dibutuhkan dalam rangka perubahan mengandalkan kekuatan paksaan (*force*) kepada akal budi, dari konflik dan kekerasan menjadi dialog dan damai.¹ Bukan hanya itu, budaya damai merupakan tumpuan bagi penciptaan stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan dunia. Kebutuhan akan budaya damai, terutama karena peradaban du-

* Penulis adalah Guru SDN Tegalombo 1 Kalijambe Sragen

¹ Castro Galace, *Peace Education; A Pathway to A Culture of Peace*, Quezon City, Philipina, Canter for Peace Education Miriam College: 2010, hlm. xi)

nia kita dari waktu ke waktu ditandai dengan berbagai tindak kekerasan. Tak terkecuali dunia pendidikan yang diharapkan menjadi desminator pendidikan. Dibalik tembok-tembok sekolah, ruang-ruang kampus kekerasan juga menjadi fenomena yang tak terbantahkan. Tawuran, vandalisme, *bullying* merupakan tindakan yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan.

Fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan yang memprihatinkan itu tentu bukan gejala yang lahir dengan sendirinya. Bisa jadi kekerasan itu berakar pada banyak faktor seperti muatan kurikulum yang hanya mengedepankan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan bahkan mungkin berakar pada paradigma pendidikan yang melihat anak didik sebagai obyek rekayasa sosial, dan tidak menempatkannya sebagai proses humanisasi.² Faktor lain yang memungkinkan lahirnya kekerasan dalam pendidikan adalah lingkungan sosial yang diwarnai dengan berbagai konflik. Sebagaimana mudah dijumpai dalam lingkungan sosial sekitar kita, meskipun reformasi telah berjalan selama 15 tahun konflik dan kekerasan masih saja menjadi gejala luas di tengah masyarakat Indonesia. Dalam kasus terkini, konflik disertai dengan kekerasan bahkan cenderung merebak dengan berbagai bentuk dan cakupannya. Beberapa ialah konflik yang menjadi perhatian luas dapat disebut diantaranya di seputar makam Mbah Priok, konflik di Tarakan, konflik Ampera, konflik atas nama agama di HKBP Ciketing, konflik gereja Yasmin Bandung, Konflik Ahmadiyah di Cikesusik, Konflik Sunni Syi'ah di Bangil dan Sampang Madura, kekerasan lewat aksi terorisme, bentrokan antarpendingung calon bupati dalam Pilkada, tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa ,tawuran antarkampung, serta pertikaian antarsuporter sepak bola dan sebagainya. Dengan mencermati berbagai konflik yang terjadi belakangan, dapat diamati adanya kecenderungan perluasan eskalasi konflik dan kekerasan tersebut. Belakangan kita juga menyaksikan bentrok antar komunitas di Lampung yang telah menelan korban jiwa belasan orang dan ribuan orang lainnya mengungsi.

Kalau pendidikan juga merupakan cerminan dari situasi masyarakat, maka tentu saja perubahan lingkungan sosial menuju lingkungan sosial yang damai menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Tindakan awal untuk membangun budaya damai itu tentu adalah melakukan berbagai diagnosis terhadap berbagai gejala kekerasan itu sendiri. Selanjutnya adalah

² Lihat Assegaf, 2004: 3

memilih strategi untuk menghentikan kekerasan itu dan menumbuhkan budaya damai (*peace culture*). Dalam konteks inilah pendidikan menjadi elemen kunci untuk penanaman budaya damai tersebut.

B. Persebaran Kekerasan: Sebuah Diagnosis

Berdasarkan keragaman jenis konflik itu Yayasan Titian Perdamaian memetakan jenis-jenis konflik yang terjadi antara tahun 2009-2010 sebagaimana tabel di bawah ini.

*Tabel 1.
Jumlah Konflik di Indonesia
Tahun 2009-2010*

Jenis Konflik	Tahun 2009		Tahun 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Konflik Berbasis Agama	6	1 %	10	1 %
Konflik Berbasis Etnik	5	1 %	15	2 %
Konflik Politik	74	12 %	117	16 %
Konflik antar aparat Negara	5	1 %	4	1 %
Konflik sumberdaya alam	54	9 %	74	10 %
Konflik sumberdaya ekonomi	30	5 %	59	8 %
Tawuran	182	30 %	231	30 %
Penghakiman masa	158	26 %	171	23 %
Pengeroyokan	53	9 %	40	5 %
Lain-lain	33	6 %	41	4 %
Jumlah	600	100	752	100

Sumber : Dany Yuda Saputra, Titian Perdamaian, 2011

Penulis menduga pada tahun antara tahun 2010-2013 jumlah konflik lebih banyak dari jumlah yang diungkapkan oleh table-tabel di atas. Mengingat pada tahun tersebut diselenggarakan Pilkada tidak kurang dari 244 kepala daerah. Belum lagi kita menghitung eksekusi kekerasan akibat penentangan Rencana Kenaikan harga BBM belakangan ini. Tabel di atas menunjukkan tawuran merupakan jenis konflik yang paling banyak terjadi disusul dengan penghakiman masa, konflik politik dan konflik sumberdaya alam. Namun demikian sepanjang tahun 2011, konflik sumberdaya alam seperti konflik di Papua, dan NTB, menjadi fenomena dominan dan menyedot perhatian publik luas. Sementara pada tahun 2012 ini ada kecenderungan

derungan konflik komunal juga meluas, sebagaimana bisa kita lihat dalam kasus kerusuhan di Makasar, Sampang, Poso, Palu dan Lampung. Dari sudut lokus konflik dan kekerasan, hampir seluruh wilayah di Indonesia menjadi lokus konflik, dimana DKI Jakarta menduduki urutan pertama sebagai lokus konflik disusul dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini bisa dilihat pada tabel peta persebaran konflik di Indonesia berikut.

Tabel
Peta Persebaran Konflik Di Indonesia 2009-2010

No	Propinsi	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	28	15
2.	Sumatera Utara	57	32
3.	Sumatera Barat	16	5
4.	Riau	12	10
5.	Kepulauan Riau	1	18
6.	Jambi	1	4
7.	Bengkulu	1	8
8.	Sumatera Selatan	14	30
9.	Bangka Belitung	1	0
10.	Lampung	2	3
11.	Banten	22	28
12.	DKI Jakarta	110	89
13.	Jawa Barat	60	66
14.	Jawa Tengah	17	34
15.	DI Yogyakarta	10	12
16.	Jawa Timur	60	87
17.	Kalimantan Barat	2	5
18.	Kalimantan Tengah	0	0
19.	Kalimantan Timur	8	15
20.	Kalimantan Selatan	3	0
21.	Bali	3	7
22.	Nusa Tenggara Barat	20	41
23.	Nusa Tenggara Timur	9	14
24.	Sulawesi Barat	9	14
25.	Sulawesi Tengah	8	3

26.	Gorontalo	3	3
27.	Sulawesi Selatan	56	76
28.	Sulawesi Tenggara	17	34
29.	Sulawesi Utara	2	4
30.	Maluku	24	47
31.	Maluku Utara	1	9
32.	Papua	23	29
33.	Papua Barat	0	10
	Total	600	752

Sumber Dany Yuda Saputra, Titian Perdamaian, 2010

Sementara itu The Wahid Institute pada 20 Januari merilis kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi sejak tahun 2009-2013

*Tabel 2
Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Intoleransi
Tahun 2009-2013*

Tahun	Jumlah Kasus
2009	121
2010	187
2011	267
2012	278
2013	245

Sumber: Data The Wahid Institute 2014

The Wahid Institute menyebut beragam tindakan intoleransi dari mulai intimidasi, pelarangan hingga serangan fisiik dengan presentasi 43 % dilakukan oleh negara, 57 % dilakukan oleh aktor non negara. Data selengkapnya mengenai berbagai bentuk intoleransi dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelaku	Jenis kekerasan	Jumlah
Negara	Menghambat/melerang, menyegel rumah ibadah	28
	Pemaksaan keyakinan	19

	Melarang/menghentikan kegiatan keagamaan	15
	Kriminalisasi atas dasar agama	14
	Diskriminasi atas dasar agama	10
	Pembiaran	9
	Melarang aliran yang diduga sesat	8
	Penyebaran kebencian	2
	Mengancam dan mengintimidasi kelompok minoritas	1
Non Negara	Serangan Fisik	27
	Penolakan/Penutupan/Penyegelan geraja	25
	Pembatasan/ pelarangan kegiatan keagamaan	16
	Tuduhan sesat	13
	Penyebaran kebencian	13
	Intimidasi	11
	Pemaksaan keyakinan	11
	Diskriminasi atas dasar agama	9
	Penolakan/penutupan/penyegelan masjid JAI	7
	Pembatasan ekspresi atas dasar agama	5
	Merendahkan kelompok/agama lain	4
	Penolakan masjid	2

Sumber: *The Wahid Institut 2014*

Selain terjadi persebaran lokus konflik dan kekerasan, konflik di Indonesia juga melibatkan banyak aktor dari mulai individu, masa, lembaga-lembaga masyarakat dan perusahaan dan bahkan negara. Dengan kata lain konflik dan kekerasan secara luas digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk menghadapi masalah. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka bukan tidak mungkin dalam masyarakat kita bukan hanya terjadi kekerasan kultural yang berupa penggunaan properti simbolik untuk bertindak kekerasan, tetapi juga mulai tumbuh budaya kekerasan (*culture of violence*) yang sangat berbahaya.

C. Menuju Konsep Holistik Tentang Damai dan Kekerasan

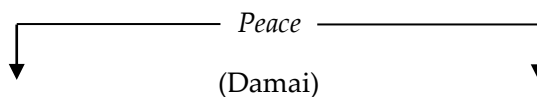
Seiring dengan kompleksitas proses perdamaian, sejak tahun 1980-an para pekerja perdamaian menentang cara pandang konvensional mengenai

damai dan menyatakan bahwa damai tidak sesederhana sebagai berkurangnya perang atau non kekerasan; damai berarti pemberantasan terhadap seluruh aspek ketidakadilan (Cheng dan Kurtz, 1989). Ada konsensus bahwa kita membutuhkan pandangan yang komprehensif mengenai damai jika kita ingin beranjak menuju budaya damai yang sesungguhnya.

Johan Galtung menjelaskan bahwa damai adalah tidak ada kekerasan (*the absence of violence*), bukan hanya kekerasan yang bersifat personal dan langsung tetapi juga kekerasan yang bersifat struktural dan tidak langsung. Bentuk-bentuk kekerasan struktural itu adalah berupa tidak adanya distribusi kekayaan dan sumberdaya, juga tidak adanya distribusi kekuasaan (power) atas keputusan mengenai distribusi sumberdaya tersebut. Karena itu dia menyatakan bahwa damai adalah ketiadaan kekerasan personal/kekerasan langsung dan adanya keadilan sosial. Ringkasnya, Galtung (1995) lebih suka memformulasikan damai sebagai : ketiadaan kekerasan (*the absence of violence*) dan kehadiran keadilan sosial (*the presence of social justice*). Galtung menyebut yang pertama diartikan secara positif, dan dia menyebutnya sebagai damai negatif (*negative peace*), sedangkan yang kedua diartikan sebagai kondisi positif (pemerataan distribusi kekuasaan, dan sumber daya), dan Galtung menyebutnya sebagai damai positif (*positive peace*).

Tampaknya, para peneliti maupun pendidik puas terhadap pembilahan konsep damai dalam dua macam damai dan menyatakan bahwa arti damai dapat ditangkap dalam gagasan mengenai damai negatif (*negative peace*) dan damai positif (*positive peace*). *Negative Peace* merujuk pada ketiadaan perang atau kekerasan fisik/kekerasan langsung, sementara *positive peace* merujuk kepada adanya keadilan dan hubungan yang tidak eksploitatif, maupun kesejahteraan manusia dan lingkungan, demikian juga akar penyebab konflik berkurang. Pengertian damai di atas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema 1
Definisi Damai





Diadopsi dari Loreta Navarro, Castro, Jasmin, Nario, Galace, 2010

Hubungan yang tidak eksploitatif sebagaimana diungkapkan di atas, merujuk tidak hanya pada hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam. Damai dengan alam dipandang sebagai dasar bagi damai positif (Mische, 1987). Hal ini karena bumi merupakan sumber utama kehidupan kita, makanan fisik kita, kesehatan dan kesejahteraan kita. Adalah tidak mungkin untuk kelangsungan hidup manusia jika kapasitas alam itu sendiri terganggu. Harus diingat pula bahwa perilaku manusia itu sendiri sangat terkait dengan sumberdaya-sumberdaya dasar (Barnaby, 1989). Ketika kekurangan sumberdaya mengancam gaya hidup dan hidup itu sendiri, persaingan untuk sumberdaya dapat mengakibatkan agresi dan konflik kekerasan.

Dengan melihat fenomena kekerasan dan pengertaaian damai seperti diuariakan di atas, maka strategi pencegahan kekerasan dan pembangunan kedamaian perlu dilakukan dengan berbagai jalan strategi (*multi tracking stretegy*). Pintu masuk untuk menerapkan berbagai jalan strategis (*multi tracking strategy*) dalam penghentian kekerasan dan pembangunan kedamaian itu adalah melalui pendidikan. Hal ini karena pendidikan (sekolah) adalah miniatur masyarakat, sebuah model sistem sosial. Sekolah juga merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya institusi yang menyiapkan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh institusi lain. Dalam sekolah siswa dan guru serta tenaga kependidikan berinteraksi satu sama lain menurut seperangkat peran-peran tertentu. Pengalaman berinteraksi inilah yang akan membentuk karakter peserta didik untuk berinteraksi dengan masyarakat lain secara keseluruhan dalam peran-peran tertentu di tengah masyarakat.

D. Pendidikan Multikultur

Dalam konteks Indonesia, yang sangat majemuk, maka pendidikan berbasis multikultural menjadi sangat strategis. Dengan pendidikan semacam ini maka peserta didik dapat mengelola kemajemukan secara kreatif. Melalui pendidikan multikultural diharapkan konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa di masa depan. Pendidikan berbasis multikultural layak dikembangkan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Pendidikan berbasis Multikultural sebaiknya dapat dikembangkan ke dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah rawan konflik sosial).

Pendidikan berbasis multikultural akan menjadi sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat secara luas. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Pertama, pendidikan berbasis multikultural selayaknya dipandang sebagai program pendidikan, dalam makna *pendidikan (education)* bukan kegiatan *persekolahan (schooling)* atau sekedar menjadi program-program

sekolah formal. *Kedua*, selayaknya pendidikan berbasis multikultural ini jangan sampai menyamakan pandangan bahwa kebudayaan sebagai kelompok etnik. Oleh karena individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai situasi-situasi dimana setiap pemahaman tersebut sesuai, maka individu-individu memiliki berbagai tingkat kompetensi dalam sejumlah kebudayaan. *Ketiga*, dengan pengembangan pendidikan berbasis multikultural pada pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi seseorang pada suatu waktu ditentukan oleh situasinya. Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang disandang individu dan identitas sosial dalam kelompok etnik tertentu.

Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Proses pengembangan *Budaya Damai* di kalangan anak-anak tidak dapat terlepas dari kegiatan pendidikan yang mereka peroleh di rumah, sekolah, serta masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Damai harus berfokus pada perbedaan minat, bakat, dan kapasitas masing-masing anak. Anak harus mampu mengekspresikan dirinya sendiri dalam mengembangkan budaya perdamaian.

Deklarasi mengenai budaya damai itu akhirnya diadopsi oleh badan umum PBB pada tahun 1999. Mengenai budaya damai itu Deklarasi PBB (1998) menyatakan: budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara-cara berperilaku dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi:

1. Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia
2. Penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi
3. Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang
4. Menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki

5. Penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi
6. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu.

E. Penutup

Sebagai salah satu institusi pendidikan, sekolah, madrasah dan pesantren memiliki arti penting dalam rangka membentuk budaya damai. Hal ini karena sebagai proses dan kondisi yang dihasilkan melalui praktik sosial, maka budaya damai hanya mungkin terjadi melalui pendidikan perdamaian, yaitu suatu pendidikan yang menekankan anak untuk hidup secara damai dengan lingkungan hidup dan sesama manusia. Dalam pendidikan perdamaian, sejak dini anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan diskriminasi dan penghinaan terhadap orang lain. Sebaliknya anak-anak didorong untuk memiliki rasa toleransi dan mencintai sesama manusia dan lingkungannya. Dalam konteks ini juga maka pengetahuan mengenai budaya damai dalam tradisi agama-agama penting untuk menjadi pijakan pengembangan budaya damai lewat pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggungjawab Sosial Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barnaby, F., (ed), 1989, *The Gaia Peace Atlas*, New York Doubleday.
- Begley, P.T. (ed.). 1999, *Values and Educational Leadership*. Albany: State University of New York.
- Barash, D, 1999, *Historical View of Peace*, dalam *World Encyclopedia of Peace*, New York, Oceana Press
- Capra, F, 1982, *The Turning Point*, Toronto, Bantam Books.
- Cheng, S dan Kurtz, 1989, *Third World Voice Defining Peace*, *Peace Review*, 10 h. 7.

- Dobrosielski, 1987, On The Preparation of Societies of life in Peace, Buletin of Peace Proposal, 18(3), hal. 240
- Dobrosielski, 1987, The Scope and Priorities in Peace Research, UNESCO, Yearbook on Peace and Conflict Studies, Westsport, Connecticut, Greenwood Press.
- Galtung, J., 1995, "Violence, Peace and Peace Research", dalam M. Salla (ed), Essays on Peace, Brisbane, University of Queensland Press.
- Haedari, Amin, dkk. 2004. Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, Jakarta: IRD Press.
- Hick, D., 1987, Education for Peace, Principles into Practice, Cambridge, Journal of Education, 17.
- Madjid, Nurcholis, 1997. Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina.
- Mastuhu, 1994. Dinamika Sistem Pesantren, Jakarta: INIS
- Mas'ud, Abdurrahman, 2004. Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi, Yogyakarta: LkiS.
- Mas'ud, Abdurrahman., dalam Nuhrison, ed. 2010, Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai, Jakarta, Puslitbang Diklat Kemenag RI.
- Mische, 1987, The Earth as Peace Teacher, Manila, International Institute on Peace Education
- Navarro, Loreta., Castro, Jasmin, Nario, Galace, 2010, Peace Education; A Pathway to A Culture of Peace, Quezon City, Philipina, Canter for Peace Education Miriam College.
- Soelaiman, M. Munandar, 1998. Dinamika Masyarakat Transisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahid, Marzuki, dkk.(peny). Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Jakarta: Pustaka Hidayah.